

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Guna memperoleh suatu gambaran mengenai lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana lokasi ini merupakan obyek dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan diberikan suatu gambaran secara umum. Gambaran umum ini diharapkan akan dapat memberikan informasi secukupnya yang melatarbelakangi perkembangan Badan Usaha Kredit Pedesaa (BUKP), khususnya BUKP Kecamatan Piyungan dalam kaitannya / perannya terhadap tingkat keberhasilan usaha masyarakat pedesaan di wilayah Kecamatan Piyungan.

3.1.1. Luas dan Batas Wilayah

Kecamatan Piyungan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Piyungan terletak 25 kilometer ke arah timur laut dari ibu kota Kabupaten Bantul dan 14 kilometer ke arah tenggara dari ibu kota Propinsi. Luas wilayah Kecamatan Piyungan seluruhnya adalah 3254,86 hektar, yang terbagi / terdiri atas 3 desa. Ketiga desa tersebut adalah Desa Srimulyo, Desa Srimartani dan Desa Sitimulyo. Wilayah Kecamatan Piyungan berbatasan dengan kecamatan-kecamatan disekitarnya yaitu disebelah utara berbatasan dengan Kecamatan

Prambanan dan Kecamatan Berbah, disebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Patuk, disebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pleret dan disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Banguntapan.

3.1.2. Topografi Lokasi Penelitian

Kecamatan Piyungan terletak di dataran rendah dengan ketinggian 80 meter di atas permukaan air laut dengan suhu maksimum 32 derajat *celsius* dan suhu minimum 23 derajat *celsius*. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak 41 persen dan berombak sampai berbukit 59 persen. Sebagian besar dari wilayahnya terdiri dari tanah kering seluas 1587,15 hektar, tanah sawah seluas 1200,8023 hektar dan sisanya terdiri dari tanah basah, hutan, perkebunan, keperluan fasilitas umum dan lain-lain.

Kecamatan Piyungan telah memiliki sarana pengairan berupa dam / bendungan sebanyak 4 buah, pompa air sebanyak 13 buah, sungai 3 buah, saluran irigasi primer dan sekunder sepanjang 13,883 kilometer dan saluran *drainase* / pembuangan sepanjang 3,719 kilometer.

Sebagian besar wilayah Kecamatan Piyungan dihubungkan oleh jalan beraspal. Kendaraan yang digunakan penduduk adalah sepeda maupun sepeda motor, sedangkan sarana angkutan umum yang ada berupa delman, minibus, bus dan truk.

3.1.3. Penduduk dan Angkatan Kerja

Kecamatan Piyungan mempunyai kepadatan penduduk 1162 jiwa perkilometer persegi. Jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 18.521 jiwa dan

perempuan sebanyak 19.293 jiwa. Jumlah kepala keluarga adalah 10.177 kepala keluarga. Dalam tiap-tiap kepala keluarga (rumah tangga) terdapat rata-rata 4 jiwa. Sedangkan jumlah angkatan kerjanya (usia 10 sampai dengan 64 tahun) lebih kurang 23.371 jiwa atau 61,8 persen dari jumlah penduduk keseluruhan.

Berdasarkan matapencapaian, jumlah penduduk yang bekerja ada sebanyak 25,889 jiwa dengan berbagai macam mata pencapaian, sebagai mana yang ditunjukkan dalam tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Matapencapaian
Kecamatan Piyungan, 2003

Mata Pencapaian	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1. Petani	16.420	63,42
2. Pengusaha sedang / besar	13	0,05
3. Pengrajin / Industri kecil	210	0,81
4. Buruh Industri	252	0,97
5. Buruh Bangunan	556	2,15
6. Buruh Pertambangan	554	2,14
7. Buruh Perkebunan	306	1,18
8. Pedagang	840	3,24
9. Pengangkutan	548	2,12
10. PNS	1.052	4,06
11. ABRI	225	0,86
12. Pensiunan	285	1,10
13. Peternak	4.628	17,88
Jumlah	25.889	99,98

Sumber : Monografi Kecamatan Piyungan, 2003 (diolah).

Di Kecamatan Piyungan sebagian besar penduduk adalah bekerja di sektor pertanian (sebagai petani) yaitu 16.420 jiwa (63,42 persen dari jumlah penduduk yang bekerja). Peternak juga cukup banyak yaitu sebanyak 4.628 jiwa (17,88 persen dari jumlah penduduk yang bekerja), sedangkan pedagang ada sebanyak 840 jiwa (3,24 persen dari jumlah penduduk yang bekerja).

3.1.4. Pertanian dan Perkebunan

Tanah pertanian di Kecamatan Piyungan yang berupa tanah sawah setengah teknis, tadah hujan / rendengan, tegal / kebun, tanah hutan rakyat dan perkebunan rakyat menempati areal seluas 2070,6968 hektar. Para petani di Kecamatan Piyungan pada umumnya mengusahakan tanaman padi yang terdiri dari padi sawah dan padi gogo. Padi sawah pada umumnya mereka tanam pada tempat-tempat (sawah) yang memiliki cukup cuplai air dan pada gogo ditanam pada tempat-tempat yang suplai airnya terbatas atau yang hanya mengandalkan air hujan, sehingga sawah yang digunakan untuk menanam padi gogo tersebut dinamakan sawah tadah hujan atau sawah rendengan. Beberapa jenis tanaman pertanian lain yang banyak dijumpai di wilayah Kecamatan Piyungan antara lain yaitu ketela pohon (kasava), ketela rambat (ubi), jagung, kacang tanah, buah-buahan dan sayur-sayuran. Selain itu, tanaman perdagangan / komoditi perkebunan yang cukup banyak dijumpai antara lain yaitu cengkeh, lada, tembakau, tembakau virginia, kelapa, tebu, jambu mete dan obat-obatan (empon-empon).

Tanah pertanian di Kecamatan Piyungan khususnya tanah sawah telah mengalami penyempitan akibat dari adanya perubahan penggunaan tanah melalui pengeringan / ijin lokasi, sawah berubah menjadi perumahan sebanyak 620 bidang. Sedangkan karena adanya kekeringan, terjadi areal puso seluas 139 hektar. Kegagalan lainnya terjadi akibat adanya serangan hama wereng dan tikus.

Dengan demikian pengalihan kerja (alih profesi) dari sektor pertanian ke sektor lain sering terjadi, akan tetapi sebenarnya banyak jenis pekerjaan lain yang sebenarnya bisa digeluti dan ditekuni masyarakat yang prospeknya cukup cerah / baik seperti perdagangan, peternakan, jasa, kerajinan atau industri kecil dan lain sebagainya.

3.1.5. Peternakan dan Perikanan

Selain pertanian, mata pencaharian penduduk yang cukup banyak dijumpai di wilayah Kecamatan Piyungan adalah peternakan dan perikanan, hal ini disebabkan karena di wilayah Piyungan tersebut bisa dibidang memiliki sarana maupun prasarana pendukung yang cukup memadai untuk usaha-usaha peternakan dan perikanan tersebut, seperti cukup mudah dalam mendapatkan rumput ataupun pakan ternak lainnya dan juga adanya irigasi yang lancar. Usaha-usaha peternakan yang ada di Kecamatan Piyungan tersebut diantaranya adalah peternakan sapi potong, domba, kambing, kelinci, kuda dan kerbau. Untuk ternak unggasnya antara lain yaitu ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, angsa, burung puyuh dan merpati. Sedangkan perikanan

yang terdapat di wilayah Kecamatan Piyungan yaitu gurameh, tombro / karper, lele, tawes, mujahir / nila dan graskap. Hasil produksi perikanan tersebut adalah sebesar 32.855 kilogram per tahun.

Khusus untuk usaha peternakan, terdapat dua macam sistim pengelolaan yang selama ini telah berjalan, yaitu ada penduduk yang mengolah usaha peternakan secara mandiri dan ada pula yang mengelola dengan sistem berkelompok. Sehingga di wilayah Kecamatan Piyungan saat ini terdapat sebanyak 17 kelompok ternak sapi potong, 3 kelompok ternak kambing, dan 2 kelompok ternak ayam buras.

3.1.6. Perekonomian

Prasarana dan sarana ekonomi yang berupa jalan, alat angkutan dan pasar memegang peranan penting dalam perekonomian. Semakin bagus / baik kondisi jalan maupun semakin banyak atau lancarnya alat angkutan serta semakin lengkap sarana pasar di wilayah tersebut, maka kondisi perekonomiannyaapun akan semakin baik pula.

Di Kecamatan Piyungan terdapat unit-unit perekonomian yang menunjang keberhasilan usaha-usaha di pedesaan, diantaranya yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Unit Desa (KUD), pasar umum, toko, bank (BRI, BPD, Bank Pasar), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dan lain sebagainya.

Aktivitas dari lembaga-lembaga di atas tidak semuanya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor dari luar lembaga seperti kurangnya kepercayaan masyarakat maupun faktor

dari dalam seperti adanya anggota / pengurus lembaga yang kurang menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus lembaga. Sarana perhubungan yang turut mendukung roda perekonomian di Kecamatan Piyungan telah cukup memadai. Sebagian besar jalan telah diaspal sehingga cukup membantu kelancaran lalu lintas ekonomi antar desa di wilayah kecamatan maupun ke daerah lainnya.

3.1.7. Kelembagaan

Di Kecamatan Piyungan, disamping memiliki beberapa faktor penunjang perekonomian yang dapat meningkatkan produktivitas usaha-usaha di pedesaan, juga terdapat beberapa lembaga formal dan non-formal seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Penyuluhan Pertanian. Program-program yang ada antara lain Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Usaha dan Keluarga Berencana. Lembaga-lembaga dan program-program tersebut berfungsi sebagai wadah untuk membina kerjasama antar warga desa dalam memecahkan berbagai permasalahan ekonomi, sosial dan budaya. Sebagian dari lembaga / program tersebut telah berjalan / berfungsi sebagaimana mestinya. .

Kegiatan-kegiatan kegotong-royongan yang masih ada dalam kehidupan masyarakat adalah kerja bakti kebersihan lingkungan seperti pembersihan jalan, pembangunan jalan kampung (gang) dan saluran irigasi. Kegotong-royongan yang berkaitan dengan usaha individual seperti misalnya di bidang pertanian, cenderung semakin berkurang. Sehingga dalam setiap pelaksanaan aktivitas usaha-usaha di pedesaan,

semua dikerjakan oleh tenaga dari dalam keluarga dan / atau tenaga upahan.

3.2. Badan Usaha Kredit Pedesaan

Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) merupakan suatu lembaga kredit yang disponsori oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang beroperasi di daerah-daerah pedesaan yang ada di masing-masing kecamatan yang dimulai sejak tahun 1987. Latar belakang pembentukan Badan Usaha Kredit Pedesaan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengembangkan usaha perbankan di daerah pedesaan, melainkan untuk pembangunan pedesaan. Untuk melaksanakan pembangunan daerah pedesaan ini, disadari oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta waktu itu, salah satu hambatannya adalah kekurangan modal dan keterampilan. Menurut persepsinya, khusus untuk masalah kekurangan modal ini bukan saja disebabkan karena sangat terbatasnya penyediaan modal tersebut kepada masyarakat secara merata.

Akibatnya bagi petani yang acapkali pada saat-saat musim panen atau sesudahnya, maupun pada saat membutuhkan bahan pangan setelah hasil panennya habis, membutuhkan adanya pinjaman dana, namun seringkali mengalami berbagai macam kesulitan, hal ini sama juga dialami para pengusaha golongan ekonomi lemah di pedesaan, yang mempunyai maksud untuk mengembangkan usahanya. Adapun keterbatasan penyediaan dana murah, dan kurang dekatnya dana tersebut dengan masyarakat pedesaan mengakibatkan banyak penduduk desa yang membutuhkan bantuan modal.

Atas dasar hal tersebut, pada tanggal 16 April 1987, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 72 / KPTS / 1987 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 1988/1989 direncanakan akan menambah 6 (enam) buah BUKP yang tersebar di 5 (lima) Kotamadya / Kabupaten Daerah Tingkat II dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 52 / DIPDA. I / KPTS / 1988 tentang pengesahan proyek yang dibiayai dari anggaran belanja pembangunan tahun anggaran 1988/1989. Sehingga sampai saat ini terdapat 75 buah BUKP diseluruh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan BUKP Kecamatan Piyungan didirikan pada tahun anggaran 1992/1993, yang berarti masa kerjanya sampai dengan saat ini hampir 12 tahun.

3.2.1. Maksud dan Tujuan Didirikannya BUKP

Maksud dan tujuan didirikannya BUKP yaitu untuk menyediakan fasilitas / sarana perkreditan bagi masyarakat di wilayah pedesaan, guna menunjang kelancaran penyediaan sarana produksi terutama permodalan dalam rangka pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya. Karena dengan meningkatnya produksi berarti akan dapat meningkatkan pendapatannya.

Meskipun sudah banyak berdiri lembaga perkreditan dengan berbagai bentuk dan macamnya, namun belum dapat menjangkau atau menembus lapisan masyarakat, karena adanya berbagai macam syarat

yang harus dipenuhi, karena situasi dan kondisinya. Maka dengan didirikannya BUKP ini diharapkan agar semua masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dapat menjangkaunya, sebagai motto tersebut yaitu:

Mudah : sistem pemberian kredit tanpa jaminan, sedangkan persyaratan lain mudah diusahakannya yaitu cukup dengan surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah, sehingga setiap peminjam merasa tidak ada persyaratan yang menjadi hambatan dalam memperoleh pinjaman tersebut.

Murah : biaya-biaya (bunga, provisi, administrasi dan lainnya) yang diperhitungkan dari pemberian pinjaman tersebut, tidak terlalu memberatkan bagi peminjam, sehingga dengan memperoleh pinjaman tersebut para nasabah diharapkan masih dapat memperoleh keuntungan yang memadai dan disamping dapat mengembalikan pinjaman beserta bunganya, para nasabah masih dapat mengembangkan usahanya.

Mengarah : kredit yang diberikan kepada pengusaha harus digunakan untuk usaha-usaha yang produktif, sehingga hasil kredit tersebut dapat dilipatgandakan untuk perkembangan usahanya dan mengembalikan kredit dari sumber pendapatan usaha tersebut bukan dari pendapatan penjualan barang di luar usaha.

Adapun tujuan jangka pendek BUKP adalah :

- a. Memberantas lintah darat atau gadai-gadai gelap, sistem ijon dan lain-lain yang dapat disamakan dengan itu. Sudah tentu pemberantasan tersebut tidak dapat sekaligus hilang, dalam arti melarangnya untuk beroperasi, karena dalam hal ini ada sebagian masyarakat yang masih tergantung kepada pelepas uang, sedangkan BUKP sendiri tidak dapat untuk melarangnya begitu saja. Sehingga dengan didirikannya BUKP oleh pemerintah daerah diharapkan secara berangsur-angsur dapat mengurangi para pelepas uang dan dalam operasinya.
- b. Menyalurkan dana-dana untuk meningkatkan produksi masyarakat desa, hal ini disebabkan karena di daerah pedesaan pada umumnya masih dirasakan kurangnya modal usaha, sehingga mengakibatkan tingkat produktivitasnya rendah, yang berakibat bagi tingkat pendapatan rendah. Maka dengan dana untuk berproduksi ini, diharapkan penghasilan masyarakat sedikit demi sedikit dapat ditingkatkan, yang berarti pula pendapatan perkapita juga akan meningkat.
- c. Membimbing masyarakat agar lebih mengenal azas-azas ekonomi dan perbankan untuk menuju masyarakat yang modern atau masyarakat yang maju dalam bidang perekonomian.

Untuk mencapai tujuan itu, maka dengan memperlihatkan *policy /* kebijaksanaan penggunaan kredit BUKP yang harus ditujukan kepada usaha-usaha yang dapat menunjang secara langsung tercapainya

peningkatan pendapatan perkapita masyarakat terutama usaha golongan ekonomi lemah, maka kebijaksanaan yang diambil BUKP antara lain :

- a. Memberikan kredit jangka pendek untuk sektor-sektor perdagangan kecil, sektor pertanian, kerajinan rakyat atau industri kecil dan sebagainya.
- b. Penyediaan modal untuk pemasaran produksi.
- c. Pembentukan modal masyarakat melalui tabungan / simpanan.

Sedangkan tujuan lain dari Badan Usaha Kredit Pedesaan dalam jangka panjang antara lain :

- a. Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat secara nyata, terutama bagi pengusaha golongan ekonomi lemah.
- b. Meningkatkan taraf hidup dan dengan demikian berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi golongan ekonomi lemah, diantaranya dengan jalan :
 1. Memberikan perlindungan / proteksi kepada para pengusaha golongan ekonomi lemah dari pengaruh yang dapat merugikan.
 2. Membentuk modal masyarakat, diantaranya yaitu dengan mengenakan simpanan wajib.
- c. Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut diharapkan akan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi yang lebih efektif dalam pembangunan.

Untuk melaksanakan maksud dan tujuan, BUKP mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah dan terarah pada masyarakat pedesaan.
- b. Menghindarkan masyarakat pedesaan dari pelepas uang / pengijon dan rentenir.
- c. Menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah.
- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat pedesaan dengan menyediakan modal melalui pertanian yang diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi produktif.

3.2.2. Struktur dan Bagan Organisasi

A. Wewenang dan Tanggung Jawab Organisasi

Dalam rancangan yang termuat dalam peraturan daerah tentang BUKP, struktur organisasi sistem BUKP meliputi beberapa tingkatan organisasi yang berjenjang, dengan menempatkan kedudukan Gubernur pada jenjang yang paling tinggi. Di bawah kedudukan Gubernur terdapat Badan Pembina Tingkat I, Badan Pembina Tingkat II, Camat dan Unit Pelaksana BUKP di tingkat Kecamatan, serta Bank Pembangunan Daerah sebagai pembina teknis.

Wewenang dan tanggung jawab masing-masing tingkatan organisasi dalam sistem BUKP adalah sebagai berikut :

(a) Gubernur

Gubernur selaku Kepala Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam :

1. Menetapkan keputusan pendirian BUKP di tiap-tiap Kecamatan, dengan memperhatikan pertimbangan Bupati / Walikota yang bersangkutan dan Badan Pembina Tingkat I.
2. Melaksanakan pembinaan umum terhadap pelaksanaan BUKP.
3. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pembina Tingkat I dan Badan Pembina Tingkat II.
4. Mengangkat dan memberhentikan karyawan BUKP yang menjabat sebagai kepala, pemegang buku dan pemegang kas.
5. Memberikan persetujuan dan atau kuasa secara tertulis kepada Kepala BUKP dalam hal-hal yang sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Menetapkan pembubaran dan penunjukan pelaksana likuidasi BUKP atas pertimbangan Badan Pembina Tingkat I, setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

(b) Badan Pembina Tingkat I

Badan Pembina Tingkat I merupakan badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat kembali. Keanggotaannya terdiri dari 7 orang, yakni Gubernur sebagai ketua merangkap anggota, pejabat-

pejabat instansi pemerintah Daerah Tingkat I yang terkait sebagai anggota dan seorang Sekretaris bukan anggota. Wewenang dan tanggung jawab Badan Pembina Tingkat I adalah :

1. Melaksanakan peran pembinaan dan pengawasan terhadap BUKP yang terdiri dari :
 - a. Merumuskan kebijaksanaan pengurusan dan pengelolaan BUKP berdasarkan kebijaksanaan pemerintah daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
 - b. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan BUKP.
 - c. Menilai dan meneliti pembukuan BUKP.
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur untuk perbaikan dan pengembangan BUKP.
2. Memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam menetapkan keputusan pendirian BUKP di tiap-tiap kecamatan.
3. Memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam menetapkan persetujuan dan atau pemberian kuasa atas tindakan-tindakan Kepala BUKP yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Gubernur.
4. Menetapkan penambahan karyawan BUKP.
5. Memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam penetapan pembubaran dan pelaksana likuidasi BUKP.

6. Memberikan persetujuan dan pengesahan atas rencana kerja tahunan yang dilengkapi dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja BUKP dan perubahannya, yang diajukan melalui Badan Pembina Tingkat II serta neraca dan perhitungan rugi dan laba tahunan BUKP.
7. Memberikan laporan tahunan dan laporan masa jabatan pada akhir masa jabatan kepada Gubernur.

(c) Badan Pembina Tingkat II

Badan Pembina Tingkat II merupakan badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali. Keanggotaannya terdiri dari 5 orang, yakni Bupati / Walikota sebagai ketua merangkap anggota, pejabat-pejabat instansi Pemerintah Daerah Tingkat II yang terkait sebagai anggota dan apabila perlu dapat diangkat seorang sekretaris bukan anggota. Wewenang dan tanggung jawab Badan Pembina Tingkat II adalah :

1. Melaksanakan pengawasan BUKP atas pelaksanaan kebijaksanaan yang digariskan oleh Badan Pembina Tingkat I.
2. Membantu dan mendorong usaha pembinaan serta pengembangan BUKP.
3. Meminta keterangan dan memberi saran kepada Kepala BUKP sehubungan dengan pengelolaan BUKP.

4. Menerima pengajuan rencana kerja tahunan yang dilengkapi dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja BUKP, dan perubahannya yang akan disampaikan kepada Badan Pembina Tingkat I untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

(d) Bank Pembangunan Daerah

Bank Pembangunan Daerah Propinsi Istimewa Yogyakarta adalah Badan Pembina Teknis BUKP.

(e) Camat

Camat adalah penanggung jawab BUKP di wilayahnya yang berwenang melaksanakan pembinaan langsung dan pengawasan pembinaan BUKP sehari-hari. Pada tahap pembentukan, Camat melaksanakan langkah persiapan menyangkut rencana lokasi / kantor dan calon karyawan BUKP.

(f) Unit Pelaksana BUKP

Unit Pelaksana BUKP dalam kegiatannya sehari-hari dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu dan membawahi karyawan lainnya, yang terdiri dari pemegang buku dan pemegang kas yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, dengan penambahan karyawan berdasarkan ketetapan Badan Pembina Tingkat I. Wewenang dan tanggung jawab Kepala BUKP adalah :

- I. Melaksanakan kebijaksanaan yang digariskan oleh Badan Pembina Tingkat I dan dalam pelaksanaan kebijaksanaan tersebut, Kepala BUKP mewakili BUKP di dalam maupun di

luar pengadilan. Peran mewakili ini dapat diserahkan kepada satu atau beberapa orang karyawan lain baik secara sendiri maupun secara bersama-sama, kepada satu atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu, atau kepada badan lain.

2. Kepala BUKP memerlukan persetujuan tertulis dari Gubernur dalam hal :
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk waktu lebih dari satu tahun.
 - b. Memperoleh, memindah tangankan atau membebani barang bergerak atau tidak bergerak.
 - c. Mengadakan pinjaman
 - d. Penyertaan modal dengan pihak lain.
 - e. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang memerlukan adanya persetujuan atau pengawasan Gubernur.
3. Sebagai bagian pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan sistem BUKP, Kepala BUKP menyampaikan rencana kerja tahunan yang dilengkapi dengan anggaran pendapatan dan belanja BUKP dan perubahannya melalui Badan Pembina Tingkat II kepada Badan Pembina Tingkat I untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan, serta menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Gubernur, Badan Pembina Tingkat I dan Badan Pembina Tingkat II, dengan tembusan Kepada Biro Perekonomian

Sekretariat Wilayah / Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Pada akhir tahun buku, Kepala BUKP menyampaikan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi / laba kepada Badan Pembina Tingkat I dan Badan Pembina Tingkat II untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Gubernur, BPD, Bupati / Walikota, Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan, serta instansi yang terkait.

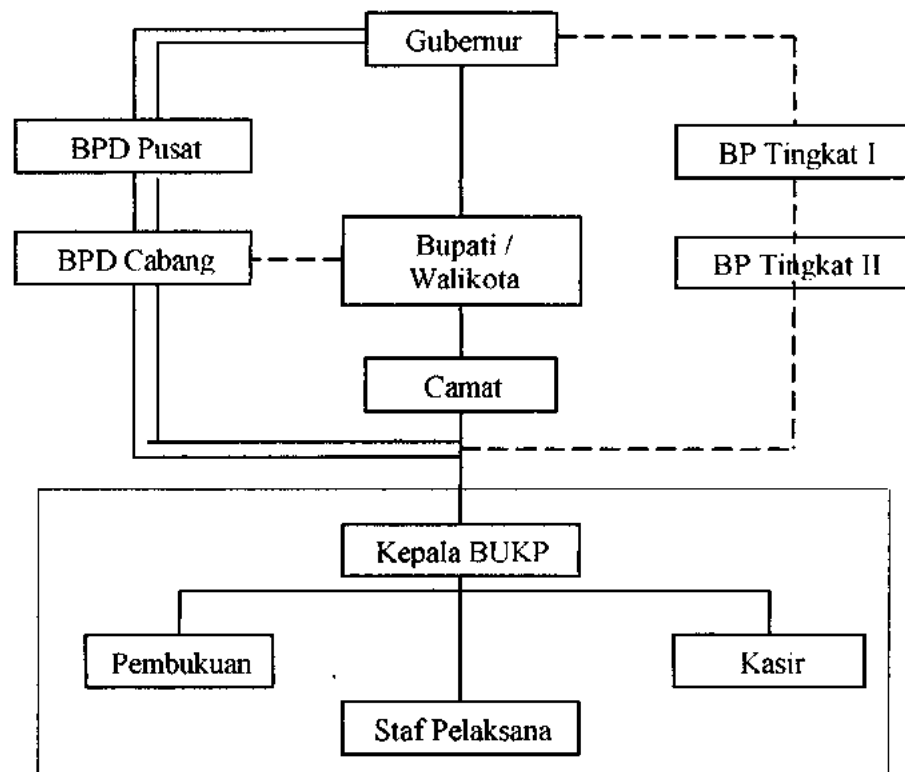
B. Bagan Organisasi

Dalam Peraturan Daerah tentang BUKP ditemukan bahwa susunan organisasi dan tata kerja BUKP ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Namun tidak ada keterangan akurat yang diperoleh mengenai hal ini. Di lain pihak, penafsiran yang berbeda mengenai struktur organisasi sistem BUKP dapat ditimbulkan dari bagan organisasi yang dikemukakan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Wilayah / Daerah (Sekda) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1.

Dalam bagan organisasi tersebut digambarkan adanya pemisahan yang tegas antara tanggung jawab fungsi konsultatif Badan Pembina, tanggung jawab pengawasan Bank Pembangunan Daerah, serta tanggung jawab fungsi kewenangan langsung yang berjenjang dari Gubernur sampai dengan organisasi unit BUKP

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di tingkat pelaksanaan. Hal ini merupakan perbedaan yang berarti jika dibandingkan hubungan organisasi sebagaimana yang dikemukakan dalam peraturan daerah tentang BUKP.

Gambar 3.1
Bagan Organisasi BUKP
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Keterangan : — : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi
 = = = : Garis Pengawasan

Sumber : Biro Perekonomian Sekda DIY

Dalam rancangan struktur organisasi yang termuat dalam peraturan daerah tentang BUKP, sebagaimana yang telah

dikemukakan, tidak ada pemisahan yang tegas atas tanggung jawab fungsional pada tingkatan organisasi diatas unit pelaksana BUKP. Terdapat tanggung jawab yang saling tumpang tindih antara peran Gubernur sebagai Kepala Daerah dengan kedudukannya sebagai Ketua Badan Pembina Tingkat I, yang sekaligus juga merupakan badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah. Disamping itu, Badan Pembina, terutama Badan Pembina Tingkat I, memiliki tanggung jawab fungsional yang berganda. Selain melaksanakan tanggung jawab konsultatif dalam memberikan saran atau pertimbangan, badan ini juga melaksanakan peran kewenangan langsung dalam pelaksanaan BUKP, seperti dalam perencanaan dan penyusunan personalia serta peran pengawasan.

Namun terlepas dari perbedaan penafsiran yang mungkin timbul, dalam kenyataannya rancangan struktur organisasi atau pengaturan kelembagaan dalam sistem BUKP, baik yang dikemukakan dalam peraturan daerah tentang BUKP maupun yang tercermin dari bagan organisasi yang dikemukakan Biro Perekonomian Sekda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada tidak sepenuhnya dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, dan merupakan bagian dari proses perkembangan sistem BUKP, peran utama organisasi diatas tingkat unit pelaksana BUKP adalah berada pada Biro Perekonomian Sekda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan jajaran pemerintah daerah pada tingkat yang lebih rendah,

termasuk juga Badan Pembina dan Bank Pembangunan Daerah, peran pengelolaannya dalam sistem BUKP akan relatif terbatas. Hal-hal yang berkaitan dengan pemusatan pengelolaan pada Biro Perekonomian Sekda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini akan dikemukakan dalam pembahasan-pembahasan yang relevan.

3.2.3. Produk Jasa Keuangan

A. Pinjaman / Kredit

Pelaksanaan pemberian pinjaman / kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua Badan Pembina Tingkat I BUKP Propinsi DIY Nomor : 108 / KPTS / 1994, tentang pelaksanaan pemberian kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Propinsi DIY. Nasabah Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) meliputi pengusaha-pengusaha yang bergerak dibidang :

- Jasa-jasa
- Pertanian / peternakan
- Perindustrian
- Perdagangan
- Lain-lain

Besarnya plafon pinjaman / kredit untuk setiap nasabah ditetapkan:

- a. Minimum Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

b. Maksimum :

- 10% (sepuluh persen) dari modal Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- 15% (lima belas persen) dari modal Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) lebih besar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

c. Untuk nasabah yang banyak diberi pinjaman / kredit lebih besar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimintakan persetujuan Badan Pembina Tingkat I.

Setiap realisasi pinjaman / kredit dikenakan biaya :

- Provisi pinjaman / kredit maksimal sebesar 1% (satu persen)
- Administrasi pinjaman / kredit maksimal sebesar 2% (dua persen) dari plafon pinjaman / kredit yang disetujui.

Sistem angsuran disesuaikan dengan jenis usaha nasabah dan kondisi daerah masing-masing Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), adalah :

- a. Harian, jangka waktu 12 hari
- b. Pasaran, jangka waktu 12 pasar, 18 pasar, 24 pasar atau 30 pasar.
- c. Mingguan, jangka waktu 12 minggu, 16 minggu, 20 minggu atau 24 minggu.
- d. Bulanan, jangka waktu 6 bulan, 10 bulan atau 12 bulan.

Suku bunga pinjaman / kredit berkisar antara 7,5% (tujuh setengah persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 11 (sebelas) minggu, disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Tingkat suku bunga dapat diterapkan berbeda untuk nasabah yang berbeda. Nasabah yang lalai dalam membayar kewajiban pinjaman / kreditnya dikenakan sanksi atau denda sebesar 1% (satu persen) perbulan dari jumlah tunggakan angsuran pokok maupun bunga.

Wilayah usaha Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) yang dapat dijangkau pelayanan yaitu :

- a. Nasabah / masyarakat yang berdomisili di wilayah kecamatan dimana Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) berkedudukan (penduduk setempat).
- b. Nasabah / masyarakat yang memiliki tempat usaha seperti los, kios atau tempat jualan yang pasti di dalam pasar, obyek wisata, terminal dan tempat-tempat umum lainnya yang berlokasi di wilayah kecamatan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) berkedudukan (bukan penduduk setempat).

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada nasabah / masyarakat penduduk setempat untuk pemberian pinjaman / kredit diperlukan rekomendasi dari Kepala Dusun, Kepala Desa / Lurah, Camat setempat dimana Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) berkedudukan. Bukan penduduk setempat diperlukan rekomendasi

dari Lurah pasar / penanggung jawab Terminal / Penanggung jawab tempat-tempat umum lainnya / Lurah atau Kepala Desa setempat dimana tempat-tempat usaha dimaksud berkedudukan, dengan tetap mempertimbangkan kelayakan usaha nasabah / masyarakat dimaksud.

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kredit adalah dengan melakukan penilaian agunan (*collateral*), dalam hal ini menentukan jenis agunan yang dipersyaratkan, maka Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dapat menentukan barang atau usaha debitur sebagai agunan sehingga Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) tidak diwajibkan meminta agunan tambahan. Semua pinjaman / kredit yang diberikan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) kepada nasabah harus memenuhi syarat-syarat dari Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) serta ditetapkan melalui akad pinjaman/ kredit yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Keputusan pemberian pinjaman / kredit berdasarkan pada penilaian yang seksama atas berbagai peraturan yang berhubungan dengan operasional BUKP, serta dalam hal ini tidak lepas dari perhitungan-perhitungan ekonomis. Ini bukan berarti bahwa BUKP tidak mau membantu kepada dunia usaha, terutama usaha golongan ekonomi lemah yang mau mengembangkan usahanya, yang saat ini sedang diusahakan pengembangannya. Tetapi dengan perhitungan-perhitungan ekonomis itu diharapkan akan dapat menekan sedikit mungkin hal-hal yang dapat merugikan BUKP sendiri. Maka dari itu

bagi calon nasabah untuk dapat memperoleh pinjaman / kredit dari BUKP harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

B. Simpanan

1. Simpanan Wajib

Diberlakukan kepada nasabah kredit sebesar 5% dari plafon pinjaman / kredit pada waktu realisasi kredit / pinjaman dilakukan.

2. Simpanan Sukarela

Selain memberikan pinjaman / kredit kepada masyarakat, Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) juga melaksanakan program pengarahannya simpanan sukarela. Program simpanan sukarela ini secara umum adalah relatif likuid. Transaksi penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan pada setiap hari kerja. Tingkat bunga simpanan ditetapkan berkisar 10% sampai 12% pertahun.

3.2.4. Sumber-sumber Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan BUKP Kecamatan Piyungan dapat dibedakan menjadi dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, akumulasi laba yang belum dibagikan, laba ditahan, dana pinjaman serta pengertian simpanan.

Pada tahap pembentukan, BUKP Kecamatan Piyungan mendapatkan setoran tunai sebesar Rp. 5.000.000,0 (lima juta rupiah) seperti halnya BUKP-BUKP lainnya atas beban Pemerintah Daerah yang diberikan sebagai setoran modal bagi :

- a. Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II se-Daerah Istimewa Yogyakarta:
- ❖ Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Pemerintah Daerah.
 - ❖ Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II.
 - ❖ Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Pemerintah Desa.
- b. Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta :
- ❖ Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Pemerintah Daerah.
 - ❖ Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dan modal BUKP ini dalam perkembangannya lebih lanjut terdiri atas pemupukan modal dan pinjaman.

Di luar pembiayaan yang dikategorikan sebagai modal, pemerintah Daerah juga menyediakan subsidi langsung pada kegiatan BUKP yang masih berada pada awal pembentukan. Subsidi ini disediakan untuk pembiayaan sewa tempat usaha selama dua tahun dan gaji karyawan selama dua tahun pertama pendirian BUKP.

Dalam sistem akuntansi di BUKP, subsidi yang diterima ini posisi sisanya di bukukan sebagai pendapatan dalam laporan rugi laba. Subsidi yang disediakan pada tahap awal pembentukan, merupakan unsur penting

yang memungkinkan BUKP untuk menghasilkan laba yang akan menjadi dasar pembentukan modal sendiri pada tahap selanjutnya.

Kebijaksanaan pembagian laba yang dilakukan satu tahun setelah berakhirnya tahun buku berjalan merupakan unsur penting dari dalam pembiayaan BUKP Kecamatan Piyungan. Kebijakan ini menempatkan akumulasi laba yang belum dibagikan menjadi sumber pembiayaan terpenting BUKP setelah penyertaan modal pemerintah sekaligus dapat berperan sebagai pendorong percepatan peningkatan kemandirian BUKP lewat pembentukan modal sendiri.

Sumber pembiayaan BUKP yang terakhir adalah pembentukan modal sendiri atau laba yang di tahan serta dana pinjaman dan pengerahan simpanan. Laba di tahan BUKP Kecamatan Piyungan terdiri dari cadangan umum dan tujuan yang masing-masing ditentukan sebesar 15% dari laba bersih setelah pajak. Sedangkan dana pinjaman BUKP Piyungan dapat dibedakan menjadi dana berasal dari sumber internal sistem BUKP yakni dana pinjaman berasal dari unit BUKP lain yang memiliki kelebihan likuiditas, dan sumber eksternal yakni dana pinjaman yang dari Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY dan lembaga keuangan lainnya.

3.2.5. Supervisi dan Pengauditan

Peran supervisi dan pengauditan di BUKP Kecamatan Piyungan jauh dari memadai. Berdasarkan keterangan yang diperoleh di BUKP Kecamatan Piyungan hubungan antara BUKP dengan Bank

Pembangunan Daerah yang seharusnya merupakan Pembina Teknis BUKP adalah tidak lebih dari sekedar hubungan antara bank kreditur dan debitur. Kenyataannya supervisi dan pengauditan dua peran yang tidak dipisahkan dan seperti dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Sekda Propinsi DIY.

BAB IV

ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh dari 40 orang nasabah BUKP Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, maka dapat diketahui bagaimana keberhasilan usaha masyarakat di Kecamatan Piyungan khususnya yang menjadi nasabah BUKP Kecamatan Piyungan tersebut. Tingkat keberhasilan usaha masyarakat dan analisis serta pembahasan mengenai dampak peranan dan perkembangan BUKP Kecamatan Piyungan terhadap tingkat keberhasilan usaha masyarakat pedesaan akan diuraikan dalam bab ini.

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis regresi.

4.1. Analisis Data Deskriptif

Analisis data deskriptif adalah analisis yang berupa uraian atas dasar tabel frekuensi dan tabel silang dari setiap variabel independen dan variabel dependen. Analisis ini dilakukan berdasarkan pada data yang dikumpulkan dari daftar kuesioner yang diedarkan pada responden.

4.1.1. Peran dan Perkembangan BUKP Kecamatan Piyungan

Dalam Tabel 4.1 berikut ini dapat diketahui perkembangan BUKP Kecamatan Piyungan selama lima tahun terakhir.

Tabel 4.1
Perkembangan Kredit di BUKP Kecamatan Piyungan
Selama 1999 – 2003

Keterangan	1999	2000	2001	2002	2003
1. Jumlah nasabah (orang)	632	684	716	762	800
2. Total kredit (Rupiah)	205.700.000	297.700.000	285.700.000	324.875.000	426.925.000
3. Rata-rata kredit (Rupiah)	325.474,68	435.233,92	399.022,35	426.345,14	533.656,25

Sumber : BUKP Kecamatan Piyungan, 2003 (diolah)

Dalam perjalanan / perkembangannya selama lima tahun terakhir, BUKP Kecamatan Piyungan cenderung terus mengalami kenaikan apabila dilihat dari jumlah nasabahnya yang dari tahun ke tahun jumlah nasabahnya terus meningkat. Namun apabila dilihat dari jumlah kredit yang disalurkan dan rata-rata kredit per nasabah perkembangan BUKP Kecamatan Piyungan cenderung mengalami situasi yang naik turun. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari situasi maupun kondisi yang dialami oleh usaha-usaha para nasabahnya. Karena apabila usaha nasabah mengalami peningkatan tentu kebutuhan modal bagi nasabah atau masyarakat menjadi meningkat sehingga banyak masyarakat yang mengajukan permohonan modal kepada BUKP Kecamatan Piyungan. Demikian pula sebaliknya, apabila usaha nasabah mengalami kelesuan tentu saja jumlah pemohon pinjaman modal menurun dan kredit yang disalurkan juga menurun.

Sedangkan peranan BUKP Kecamatan Piyungan bagi masyarakat pedesaan di wilayah Piyungan diantaranya adalah :

- a. Memberantas lintah darat atau gadai-gadai gelap, sistem ijon dan lain-lain yang dapat disamakan dengan itu. Sudah tentu pemberantasan tersebut tidak dapat sekaligus hilang, dalam arti melarangnya untuk beroperasi, karena dalam hal ini ada sebagian masyarakat yang masih tergantung kepada pelepas uang, sedangkan BUKP sendiri tidak dapat untuk melarangnya begitu saja. Sehingga dengan didirikannya BUKP oleh pemerintah daerah diharapkan secara berangsur-angsur dapat mengurangi para pelepas uang dan dalam operasinya.
- b. Menyalurkan dana-dana untuk meningkatkan produksi masyarakat desa, hal ini disebabkan karena di daerah pedesaan pada umumnya masih dirasakan kurangnya modal usaha, sehingga mengakibatkan tingkat produktivitasnya rendah, yang berakibat bagi tingkat pendapatan rendah. Maka dengan dana untuk berproduksi ini, diharapkan penghasilan masyarakat sedikit demi sedikit dapat ditingkatkan, yang berarti pula pendapatan perkapita juga akan meningkat.
- c. Membimbing masyarakat agar lebih mengenal azas-azas ekonomi dan perbankan untuk menuju masyarakat yang modern atau masyarakat yang maju dalam bidang perekonomian.

4.1.2. Pengelompokan Responden

Dari hasil pengumpulan data nasabah BUKP Kecamatan Piyungan diperoleh data tentang tempat usaha yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penggolongan Nasabah BUKP Kecamatan Piyungan Berdasarkan Tempat Usaha

Klasifikasi tempat usaha	Frekuensi (orang)	Persentase
Kios	21	52,5 %
Pasar	6	15 %
Rumah	7	17,5 %
Lain-lain	6	15 %
Jumlah	40	100%

Sumber: Data Primer Penelitian BUKP Kec. Piyungan, 2004

Dari tabel 4.1 diketahui bahwa nasabah yang memiliki tempat usaha berupa kios merupakan responden terbanyak yaitu sebanyak 21 orang (52,5%, diikuti dengan nasabah yang menjadikan rumah sebagai tempat usaha yaitu 7 orang (17,5%), kemudian yang membuka usaha di pasar dan di lainnya (kandang, bengkel, penggilingan padi) sebanyak masing-masing sama yakni 6 orang (15%).

Dengan mengetahui tempat usaha responden yang kebanyakan membuka usahanya dengan membuka kios, BUKP Kecamatan Piyungan

dituntut untuk selalu memperhatikan keadaan latar belakang nasabah sehingga lebih banyak nasabah yang membuka kios daripada nasabah yang membuka usahanya di rumah atau di pasar.

Pada tabel 4.2 berikut dapat diketahui penggolongan nasabah berdasarkan status kepemilikan tempat usaha.

Tabel 4.3
Penggolongan Nasabah BUKP Kecamatan Piyungan
Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Usaha

Klasifikasi tempat usaha	Frekuensi (orang)	Persentase
Milik Sendiri	28	70 %
Sewa	11	27,5 %
Tidak punya tempat	1	2,5 %
Jumlah	40	100%

Sumber: Data Primer Penelitian BUKP Kec. Piyungan, 2004

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa nasabah yang memiliki tempat usaha sendiri sebanyak 28 orang (70%) sedangkan 11 orang (27,5%) masih menyewa/kontrak, dan yang tidak memiliki tempat usaha sendiri dan tidak menyewa hanya 1 orang (2,5%). Dari data tersebut tampak bahwa sebagian besar nasabah telah memiliki tempat usaha sendiri, sehingga dengan demikian biaya yang seharusnya untuk sewa tempat dapat dialokasikan untuk kepentingan lainnya.

Sedangkan untuk mengetahui kurun waktu pengelolaan usaha nasabah BUKP Kecamatan Piyungan, dapat digolongkan seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Penggolongan Nasabah BUKP Kecamatan Piyungan
Berdasarkan Waktu Pengelolaan Usaha

Klasifikasi lama usaha	Frekuensi (orang)	Persentase
> 15 tahun	5	12,5 %
10 – 15 tahun	8	20 %
5 – 9 tahun	12	30 %
< 5 tahun	15	37,5 %
Jumlah	40	100%

Sumber: Data Primer Penelitian BUKP Kec. Piyungan, 2004

Pada tabel 4.3 terlihat bahwa nasabah yang telah mengelola usahanya lebih dari 15 tahun ada 5 orang (12,5%), yang mengelola usaha selama 10 s/d 15 tahun ada 8 orang (20%), yang mengelola usaha selama 5 s/d 9 tahun ada 12 orang (37,5%). Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya nasabah BUKP Kecamatan Piyungan telah memiliki cukup pengalaman dalam mengelola usahanya. Hal ini juga diperkuat dari data-data responden yang menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah BUKP Kecamatan Piyungan berusia 30 tahun ke atas bahkan 40 tahun ke atas.

4.1.3. Karakteristik Responden

Dalam mengambil keputusan untuk mengambil kredit di BUKP Kecamatan Piyungan, nasabah mempunyai karakter yang berbeda-beda. Perbedaan ini merupakan salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya pengambilan kredit. Karakteristik nasabah mencakup modal. Tidak semua nasabah memiliki modal uang. Dengan kata lain, saat mereka mengambil kredit di BUKP Kecamatan Piyungan untuk usaha produktifnya, mereka tidak semuanya memiliki modal uang akan tetapi mereka telah modal lain (selain modal uang) seperti barang, tanah, bangunan, mesin-mesin atau inventaris lainnya. Yang dimaksud modal di sini adalah modal yang dimiliki nasabah yang digunakan untuk usaha produktifnya selain kredit atau pinjaman lainnya. Jadi modal tersebut merupakan kekayaan nasabah sendiri. Modal yang merupakan salah satu faktor usaha, telah dimiliki oleh sebagian besar nasabah BUKP Kecamatan Piyungan meskipun hanya berwujud barang / benda yang nilainya dapat dinyatakan dengan uang.

Untuk kelancaran usaha produktifnya, masyarakat berusaha memenuhi kekurangannya dengan berbagai cara, misalnya dengan meminjam uang (kredit). Menurut data penelitian yang telah berhasil diperoleh, selain meminjam kepada BUKP ada juga sebagian nasabah BUKP yang meminjam uang kepada pihak lain. Tabel berikut menunjukkan antara masyarakat yang hanya mengambil kredit di BUKP

Kecamatan Piyungan dengan yang mengambil kredit diluar BUKP Kecamatan Piyungan.

Tabel 4.5
Karakteristik Nasabah
Berdasarkan Sumber Kredit

Sumber kredit	Frekuensi (orang)	Persentase
BUKP Kecamatan Piyungan	33	82,5%
BUKP Kecamatan Piyungan dan lainnya	7	17,5%
Jumlah	40	100%

Sumber: Data Primer Penelitian BUKP Kec. Piyungan, 2004

Dari tabel 4.4 diketahui bahwa selain mengambil kredit di BUKP Kecamatan Piyungan ada juga nasabah yang mengambil kredit dari sumber lainnya karena mereka merasa kebutuhan modal untuk membiayai usahanya belum terpenuhi seluruhnya, dengan kata lain kredit dari BUKP Kecamatan Piyungan baru dapat digunakan untuk mempertahankan usaha tetapi belum dapat untuk mengembangkan usaha. Namun demikian 82,5 % nasabah hanya mengambil kredit dari BUKP Kecamatan Piyungan. Meskipun demikian, sikap kehati-hatian dari BUKP Kecamatan Piyungan perlu terus di kembangkan. Untuk jangka

panjang dalam kondisi pasar yang makin kompetitif dan masyarakat yang makin kritis, masyarakat akan memilih yang terbaik di antara yang baik.

Keputusan masyarakat hanya mengambil kredit di BUKP Kecamatan Piyungan dikarenakan adanya berbagai faktor pendukung dalam memilih BUKP Kecamatan Piyungan. Berikut pendapat nasabah terhadap fasilitas yang ditawarkan BUKP Kecamatan Piyungan yang mendukung dalam memilih BUKP Kecamatan Piyungan.

Tabel 4.6
Faktor-faktor Pendukung dalam Memilih
BUKP Kecamatan Piyungan

Faktor pendukung	Frekuensi (orang)	Persentase
Pelayanan cepat	27	67,5 %
Tanpa jaminan	-	-
Bunga rendah	-	-
Prosedur mudah	13	32,5 %
Jumlah	40	100%

Sumber: Data Primer Penelitian BUKP Kec. Piyungan, 2004

Dari tabel 4.5 terlihat bahwa nasabah yang memilih BUKP Kecamatan Piyungan karena pelayanan yang cepat sebagai faktor pendukung ada 27 orang (67,5 %) dan yang memilih karena prosedurnya mudah ada 13 orang (32,5%). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan

cepat dan prosedur mudah merupakan dua hal yang sangat diinginkan oleh masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Sehingga BUKP Kecamatan Piyungan yang memiliki dua karakter tersebut berhasil merebut hati masyarakat. Sedangkan untuk fasilitas tanpa jaminan ternyata tidak selalu berlaku karena adanya alasan keamanan (*safety*) dari BUKP Kecamatan Piyungan. Hal ini dikarenakan permodalan BUKP Kecamatan Piyungan sendiri dirasakan masih sangat terbatas

Selain adanya faktor pendukung dalam memilih BUKP Kecamatan Piyungan, juga terdapat faktor penghambat atau faktor yang memberatkan nasabah pada saat memanfaatkan kredit dari BUKP Kecamatan Piyungan tersebut yaitu bunga yang dirasakan terlalu tinggi oleh nasabah yaitu sebesar 24% per tahun. Dari hasil kuesioner, sebanyak 40 nasabah hampir seluruhnya menyatakan keluhan tersebut. Akan tetapi bagaimanapun juga, adanya BUKP Kecamatan Piyungan merupakan solusi bagi kebutuhan modal usaha bagi masyarakat pedesaan.

4.1.4. Distribusi Pendapatan Berdasarkan Variabel Pengaruh

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden, diperoleh data yang menyatakan besarnya pendapatan yang merupakan variabel yang dipengaruhi (*dependen*) dan data kredit, modal, lama usaha, lama pendidikan dan kepemilikan usaha sampingan, merupakan variabel pengaruh (*independen*). Untuk lebih jelasnya, pendistribusian pendapatan berdasarkan variabel pengaruh akan dijelaskan melalui tabel berikut :

1) Distribusi Pendapatan Berdasarkan Besarnya Jumlah Kredit

Tabel 4.7
Distribusi Pendapatan Berdasarkan Besarnya Kredit
(dalam ribuan rupiah)

Pendapatan (ribuan rupiah / bulan)	Besarnya kredit (ribuan rupiah)				Jumlah
	250 – 750	800 – 1250	1300-2000	>2000	
< 750	2	-	-	-	2
750 – 1.250	8	4	4	-	16
1.300 – 2.000	-	9	3	-	12
> 2.000	-	1	6	3	10
Jumlah	10	14	13	3	40

Sumber: Data Primer Penelitian BUKP Kecamatan Piyungan, 2004

Dari tabel 4.6 terlihat bahwa masyarakat (nasabah) yang berpenghasilan antara Rp 750.000,00 hingga Rp 1.250.000,00 adalah yang paling dominan yaitu sebanyak 16 orang, sedangkan besarnya kredit yang paling banyak diambil antara Rp 800.000,00 hingga Rp 1.250.000,00 yaitu sebanyak 14 orang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat (nasabah) BUKP Kecamatan Piyungan mayoritas mempunyai tingkat pendapatan antara Rp 750.000,00 hingga Rp 1.250.000,00 per bulan, dan rata-rata kredit yang diambil antara Rp 800.000,00- hingga Rp 1.250.000,00. Pengaruh kredit terhadap besarnya pendapatan adalah bahwa dengan adanya kredit maka

nasabah dapat melakukan usaha produktifnya sehingga mampu meningkatkan pendapatannya.

2) Distribusi Pendapatan Berdasarkan Modal

Tabel 4.8
Distribusi Pendapatan Berdasarkan Besarnya Modal
(dalam ribuan rupiah)

Pendapatan (ribuan rupiah / bulan)	Besarnya Modal (ribuan rupiah)				Jumlah
	250-2.000	2.100-5.000	5.100-10.000	>10.000	
< 750	2	-	-	-	2
750 – 1.250	7	5	5	-	17
1.300 – 2.000	4	6	2	-	12
> 2.000	4	2	1	2	9
Jumlah	17	13	8	2	40

Sumber: Data Primer Penelitian BUKP Kecamatan Piyungan, 2004

Dari tabel 4.7 terlihat bahwa masyarakat (nasabah) yang berpenghasilan antara Rp 750.000,00 hingga Rp 1.250.000,00 dengan modal Rp 250.000,00 hingga Rp 2.000.000,00 adalah yang paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan modal yang terbatas, masyarakat berupaya mempertahankan kelangsungan usahanya. Sehingga untuk menutupi kekurangan modal tersebut, masyarakat berusaha mengambil pinjaman / kredit dari BUKP Kecamatan Piyungan demi kelancaran kelangsungan usaha mereka.

3) Distribusi Pendapatan Berdasarkan Pengalaman atau Lama Usaha

Tabel 4.9
Distribusi Pendapatan Berdasarkan
Pengalaman atau Lama Usahnya

Pendapatan (ribuan rupiah / bulan)	Lama Usaha (dalam tahun)				Jumlah
	0 – 5	6 – 10	10 – 15	> 15	
< 750	-	1	-	1	2
750 – 1.250	5	5	3	3	16
1.300 – 2.000	4	4	3	1	12
> 2.000	9	1	-	-	10
Jumlah	18	11	6	5	40

Sumber: Data Primer Penelitian BUKP Kecamatan Piyungan, 2004

Dari tabel 4.8 terlihat bahwa masyarakat (nasabah) yang berpenghasilan antara Rp 750.000,00 hingga Rp 1.250.000,00 dan memiliki pengalaman atau lama usaha 0 sampai dengan 5 tahun (5 tahun kebawah) adalah yang paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dengan pengalaman atau lama usaha yang masih relatif sedikit (belum lama) namun dengan usaha yang memiliki omset bagus, mampu mencapai tingkat pendapatan yang cukup tinggi. Sedangkan masyarakat dengan pengalaman lama namun dengan omset yang kurang bagus cenderung hanya mencapai tingkat

pendapatan yang lebih kecil. Jadi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pengalaman yang lama tidak selalu menjamin tingkat pendapatan yang tinggi, namun tingkat pendapatan yang tinggi bisa dicapai dengan usaha yang memiliki omset penjualan yang baik (tinggi).

4) Distribusi Pendapatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan atau Lama Pendidikan

Tabel 4.10
Distribusi Pendapatan Berdasarkan
Tingkat Pendidikan atau Lama Pendidikan

Pendapatan (ribuan rupiah / bulan)	Lama Pendidikan (dalam tahun)				Jumlah
	0 – 6	7 – 9	10 – 12	> 12	
< 750	2	-	-	-	2
750 – 1.250	8	5	3	-	16
1.300 – 2.000	4	1	7	-	12
> 2.000	3	2	4	1	10
Jumlah	17	8	14	1	40

Sumber: Data Primer Penelitian BUKP Kecamatan Piyungan, 2004

Dari tabel 4.8 terlihat bahwa masyarakat (nasabah) yang berpenghasilan antara Rp 750.000,00 hingga Rp 1.250.000,00 dan telah mengenyam pendidikan selama paling lama 6 tahun adalah yang paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar

masyarakat hanya lulusan sekolah dasar atau hanya mengenyam pendidikan selama 6 tahun saja, sehingga kemampuan dalam pengelolaan usaha (*skill*) mereka sebenarnya masih sangat kurang sehingga tingkat pendapatan mereka juga relatif rendah. Dengan kata lain, pendidikan dewasa ini sudah keterampilan atau keahlian yang dapat diperoleh dari lembaga pendidikan. Karena persaingan di dunia usaha sudah sangat kompetitif, tingkat pendidikan betapapun rendahnya sudah dapat dimasukkan sebagai variabel pengaruh bagi perolehan pendapatan masyarakat. Bekal pengalaman dalam usaha masih dirasakan kurang kalau tidak memiliki keahlian tertentu.

5) Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kepemilikan Usaha Sampingan

Tabel 4.11
Distribusi Pendapatan Berdasarkan
Kepemilikan Usaha Sampingan

Pendapatan (ribuan rupiah / bulan)	Kepemilikan Usaha Sampingan		Jumlah
	Punya	Tidak Punya	
< 750	-	2	2
750 – 1.250	1	15	16
1.300 – 2.000	4	8	12
> 2.000	9	1	10
Jumlah	14	26	40

Sumber: Data Primer Penelitian BUKP Kecamatan Piyungan, 2004

Dari tabel 4.8 terlihat bahwa masyarakat (nasabah) yang berpenghasilan antara Rp 750.000,00 hingga Rp 1.250.000,00 adalah paling menonjol. Sedangkan masyarakat yang tidak mempunyai usaha sampingan juga lebih menonjol. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak mempunyai usaha sampingan hanya dapat mencapai tingkat pendapatan yang cenderung lebih rendah dari pada masyarakat yang mempunyai usaha sampingan. Artinya bahwa kepemilikan usaha sampingan sangat berperan besar dalam mendukung peningkatan pendapatan keluarga.

4.2. Hasil Estimasi

4.2.1. Pengujian Statistik

Dari hasil estimasi diperoleh nilai t hitung masing-masing variabel penjelas (independen) untuk dapat melakukan pengujian satu sisi. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	314259.3	194532.1	1.615462	0.1155
X1	0.476602	0.099686	4.781045	0.0000
X2	0.023855	0.012704	1.877724	0.0690
X3	-12189.69	7396.581	-1.648017	0.1086
X4	44792.09	17356.96	2.580641	0.0144
DM	611323.8	119509.4	5.115279	0.0000
R-squared	0.828150			
Adjusted R-squared	0.802878			
F-statistic	32.76949			
Prob(F-statistic)	0.000000			
Durbin-Watson stat	1.903601			

Sumber: Lampiran

$$Y = 314259,2804 + 0,4766 X_1 + 0,0239 X_2 - 12189,6917 X_3 + 44792,0948 X_4 + 611323,7625 DM$$

Keterangan :

- Y = tingkat pendapatan (dalam rupiah per bulan)
- X_1 = jumlah kredit (dalam rupiah)
- X_2 = besarnya modal (dalam rupiah)
- X_3 = pengalaman atau lama usaha (dalam tahun)
- X_4 = tingkat pendidikan atau lama pendidikan (dalam tahun)
- DM = kepemilikan usaha sampingan (*dummy variable*),
dimana :
DM = 1, jika punya usaha sampingan
DM = 0, jika tidak punya usaha sampingan

A. Uji t terhadap parameter X_2 yaitu variabel Besarnya Kredit.

Hipotesis :

❖ $H_0 : b_i \leq 0$ Berarti variabel independen tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

$H_0 : b_i > 0$ Berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

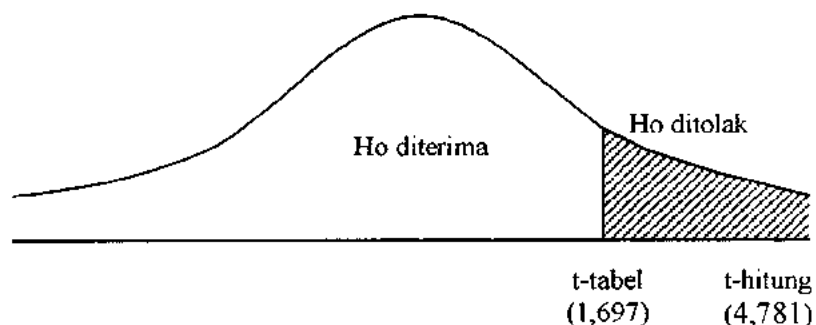
Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima.

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak.

❖ Dengan derajat kebebasan $\alpha = 0,05$ dan $df = 34$

Maka nilai $t_{tabel} = 1,697$ dan untuk $t_{hitung} = 4,781$

Gambar 4.1
Kurva uji t Besarnya Kredit



Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $4,781 > 1,697$ maka H_0 ditolak, artinya secara individu variabel besarnya kredit mempengaruhi positif terhadap pendapatan nasabah.

B. Uji t terhadap parameter X_2 yaitu variabel Besarnya Modal.

Hipotesis :

❖ $H_0 : b_i \leq 0$ Berarti variabel independen tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

$H_0 : b_i > 0$ Berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

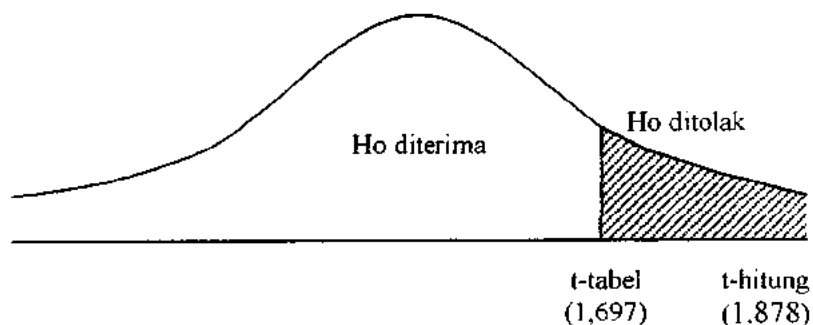
Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima.

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak.

❖ Dengan derajat kebebasan $\alpha = 0,05$ dan $df = 34$

Maka nilai $t_{tabel} = 1,697$ dan untuk $t_{hitung} = 1,878$

Gambar 4.2
Kurva uji t Besarnya Modal



Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $1,878 > 1,697$ maka H_0 ditolak, artinya secara individu variabel besarnya modal mempengaruhi positif terhadap pendapatan nasabah.

C. Uji t terhadap parameter X_3 yaitu variabel Lama Usaha.

Hipotesis :

❖ $H_0 : b_i \leq 0$ Berarti variabel independen tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

$H_0 : b_i > 0$ Berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

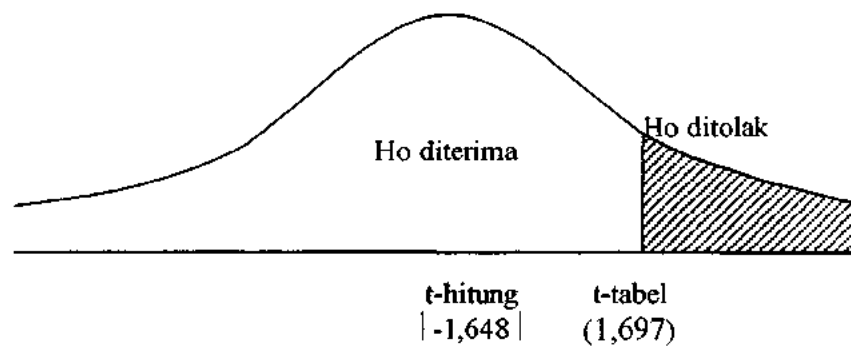
Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima.

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak.

❖ Dengan derajat kebebasan $\alpha = 0,05$ dan $df = 34$

Maka nilai $t_{tabel} = 1,697$ dan untuk $t_{hitung} = |-1,648|$

Gambar 4.3
Kurva uji t Lama Usaha



Karena nilai t hitung < t tabel atau $|-1,648| < 1,697$ maka H_0 diterima, artinya secara individu variabel lama usaha tidak dapat mempengaruhi terhadap tingkat pendapatan (tidak signifikan), karena mereka (pedagang, para pengusaha) yang telah lama menekuni usahanya justru berpenghasilan lebih kecil dari pada mereka yang baru menekuni usahanya, ini karena para pengusaha baru menekuni / membuka usaha yang omset penjualanya atau harga jualnya lebih tinggi (daganganya lebih laku) dari pada usaha yang ditekuni pengusaha yang telah lama sehingga mau tidak mau tingkat pendapatan pengusaha baru cenderung lebih tinggi dari pada pengusaha yang telah lama. Hal ini menyebabkan variabel ini (lama usaha atau pengalaman) menjadi tidak signifikan / tidak dapat mempengaruhi tingkat pendapatan.

D. Uji t terhadap parameter Lama Pendidikan.

Hipotesis :

❖ $H_0 : b_i \leq 0$ Berarti variabel independen tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

$H_0 : b_i > 0$ Berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

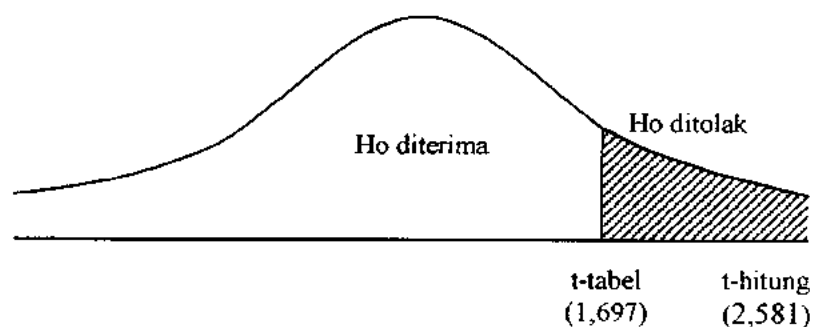
Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima.

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak.

❖ Dengan derajat kebebasan $\alpha = 0,05$ dan $df = 34$

Maka nilai $t_{tabel} = 1,697$ dan untuk $t_{hitung} = 2,581$

Gambar 4.4
Kurva uji t Lama Pendidikan



Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,581 > 1,697$ maka H_0 ditolak, artinya secara individu variabel lama pendidikan mempengaruhi positif terhadap pendapatan nasabah.

E. Uji t terhadap parameter DM yaitu Kepemilikan Usaha Sampingan.

Hipotesis :

❖ $H_0 : b_i \leq 0$ Berarti variabel independen tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

$H_0 : b_i > 0$ Berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

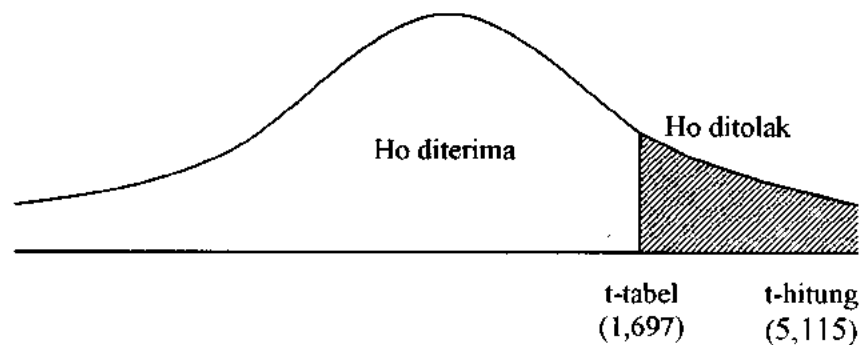
Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima.

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak.

❖ Dengan derajat kebebasan $\alpha = 0,05$ dan $df = 34$

Maka nilai $t_{tabel} = 1,697$ dan untuk $t_{hitung} = 5,115$

Gambar 4.5
Kurva uji t Dummy



Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $5,115 > 1,697$ maka H_0 ditolak, artinya secara individu variabel dummy mempengaruhi positif terhadap pendapatan nasabah.

4.2.2. Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui semua variabel independen secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian yang dilakukan menggunakan distribusi F, yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel.

Dengan derajat kebebasan sebesar ($\alpha=5\%$), maka diperoleh nilai F tabel sebesar $F = (5\% ; k-1 ; n-k) ; F = (0,05 ; 5 ; 34)$ atau F tabel = 2,53 sedangkan F hitung yang diperoleh dari hasil estimasi sebesar 32,769 . Karena nilai F hitung > F tabel atau $32,769 > 2,53$ berarti secara bersama-sama variabel bebas (besarnya kredit, besarnya modal, lama usaha, lama pendidikan dan *dummy variable*) mempengaruhi pendapatan nasabah.

4.2.3. Penaksiran Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian terhadap R^2 adalah mengukur koefisien garis regresi dengan sebaran data, atau dengan kata lain R^2 adalah mengukur proporsi atau prosentase dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi yang diperoleh. Dari hasil perhitungan regresi yang dilakukan diperoleh R^2 sebesar 0,828150 hal ini berarti variabel independen mampu menjelaskan variasi total variabel dependen sebesar 82,8 % dan sisanya sebesar 17,2 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.3. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya, Multikolinear, Heteroskedastik dan Autokorelasi dalam hasil estimasi. Terjadinya penyimpangan

terhadap asumsi klasik tersebut diatas akan menyebabkan. Uji *statistic* (uji t-stat dan F-stat) yang dilakukan menjadi tidak valid dan secara statistik akan mengacaukan kesimpulan yang diperoleh.

4.3.1 Pengujian Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas terjadi apabila variabel gangguan mempunyai variabel yang sama untuk semua observasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas digunakan uji park yang perhitungannya ada dilampiran.

Tabel 4.13
Uji Heteroskedastisitas (Uji White)

White Heteroskedasticity Test:			
F-statistic	1.368715	Probability	0.245658
Obs*R-squared	11.64356	Probability	0.234157

Sumber: Lampiran

Dari tabel 4.2. terlihat bahwa χ^2 hitung (Obs*R-squared) 11,643 < dari χ^2 tabel (16,919) sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

4.3.2 Pengujian Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi (adanya hubungan korelasi diantara anggota-anggota dari persamaan yang tersusun dalam rangking ruang dan waktu), adalah dengan cara melihat nilai Durbin-Watson test-nya yang terdapat dalam hasil regresi, kemudian bandingkan dengan d_l dan d_u kritisnya. Berikut adalah tabel letak daerah autokorelasi:

Tabel 4.14
Daerah Autokorelasi

Nilai D-W	Artinya
$4 - d_l < DW < 4$	Terjadi autokorelasi negatif
$4 - d_u < DW < 4 - d_l$	Tidak ada kesimpulan
$2 < DW < 4 - d_u$	Tidak terjadi autokorelasi
$d_u < DW < 2$	Tidak terjadi autokorelasi
$d_l < DW < d_u$	Tidak ada kesimpulan
$0 < DW < d_l$	Terjadi autokorelasi positif

Menurut hasil estimasi yang diperoleh dimana nilai DW-stat = 1,996 nilai d_l pada $\alpha=5\%$ untuk ($n=40$), nilai d_l adalah 1,230 dan nilai $d_u = 1,786$, itu menunjukkan bahwa nilai DW-stat berada diantara $d_u < DW < 2$, yang berarti berada didaerah non autokorelasi.

4.3.3 Pengujian multikolinearitas

Multikolinier adalah keadaan di mana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari variabel independen lainnya, atau dengan kata lain variabel-variabel independen yang satu merupakan fungsi variabel dari variabel yang lain.

Cara untuk mendeteksi adanya multikolinear adalah dengan menggunakan Korelasi Matriks hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Uji Multikolinier

	Y	X1	X2	X3	X4	DM
Y	1.000000	0.758190	0.356716	-0.524718	0.402955	0.724766
X1	0.758190	1.000000	0.235671	-0.399206	0.304704	0.453798
X2	0.356716	0.235671	1.000000	-0.082510	0.191756	0.164584
X3	-0.524718	-0.399206	-0.082510	1.000000	-0.091387	-0.448219
X4	0.402955	0.304704	0.191756	-0.091387	1.000000	0.098661
DM	0.724766	0.453798	0.164584	-0.448219	0.098661	1.000000

Dari hasil pengujian Korelasi Matriks di atas dapat dilihat bahwa semua koefisien lebih kecil dari 0,80 ,maka dapat disimpulkan semua variabel independen tidak terdapat multikolinear.

$$Y = 314259,2804 + 0,4766 X_1 + 0,0239 X_2 - 12189,6917 X_3 + 44792,0948 X_4 + 611323,7625 DM$$

4.4. Interpretasi Analisis Data

1. Variabel Besarnya Kredit terbukti mempengaruhi positif terhadap Tingkat Pendapatan sebesar 0,4766. Artinya setiap penambahan besarnya kredit Rp.1,- mengakibatkan kenaikan pendapatan sebesar Rp. 0,4766 ,*ceterisparibus*.
2. Variabel Besarnya Modal terbukti mempengaruhi positif terhadap Tingkat Pendapatan sebesar 0,0239. Artinya setiap penambahan besarnya modal Rp.1,- mengakibatkan kenaikan pendapatan sebesar Rp. 0,0239 ,*ceterisparibus*.
3. Variabel Lama Usaha tidak dapat mempengaruhi Tingkat Pendapatan, karena pengusaha yang telah lama menekuni usahanya justru berpenghasilan lebih kecil dari pada pengusaha yang baru menekuni usahanya, ini karena para pengusaha baru menekuni / membuka usaha yang omset penjualannya atau harga jualnya lebih tinggi (daganganya lebih laku) dari pada usaha yang ditekuni pengusaha yang telah lama, sehingga mau tidak mau tingkat pendapatan pengusaha baru cenderung lebih tinggi dari pada pengusaha yang telah lama. Hal ini menyebabkan variabel ini (lama usaha atau pengalaman) menjadi tidak signifikan / tidak dapat mempengaruhi tingkat pendapatan.

4. Variabel Lama Pendidikan terbukti mempengaruhi positif terhadap Tingkat Pendapatan sebesar 44792,0948. Artinya setiap penambahan lama pendidikan 1 tahun mengakibatkan kenaikan pendapatan sebesar Rp. 44.792,- ,*ceterisparibus*.
5. Variabel *Dummy* (Kepemilikan Usaha Sampingan) terbukti mempengaruhi positif terhadap Tingkat Pendapatan sebesar 611323,7625. Artinya jika memiliki usaha sampingan akan mengakibatkan kenaikan pendapatan sebesar Rp. 611.323,- ,*ceterisparibus*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat dilihat bahwa kecenderungan nasabah BUKP Kecamatan Piyungan dalam mengalokasikan kredit yang mereka peroleh adalah digunakan sebagai tambahan modal dalam menjalankan usaha-usahanya. Dengan kredit yang telah diberikan oleh BUKP Kecamatan Piyungan tersebut maka para nasabah mampu mempertahankan kelangsungan usaha-usaha produktifnya demi mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi atau dengan kata lain bisa mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Akhirnya penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan berdasarkan tahapan-tahapan dalam menganalisis tentang peran dan perkembangan Badan Usaha Kredit Pedesaan terhadap tingkat keberhasilan usaha masyarakat pedesaan studi kasus BUKP Kecamatan Piyungan, yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Variabel dependen yaitu tingkat pendapatan dipengaruhi oleh besarnya kredit, besarnya modal, lama usaha, lama pendidikan dan kepemilikan usaha sampingan. Secara serentak (Uji F) variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen / signifikan secara statistik.

2. Dari hasil pengujian R square diperoleh kesimpulan variabel independen serta variasi model dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 82,8 % (nilai R square) dan sisanya sebesar 17,2 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model.
3. Variabel tingkat pendapatan (uji t) dipengaruhi oleh variabel besarnya kredit yang signifikan secara statistik, sehingga berpengaruh dan mendukung hipotesis.
4. Variabel tingkat pendapatan (uji t) dipengaruhi oleh variabel besarnya modal yang signifikan secara statistik, sehingga berpengaruh dan mendukung hipotesis.
5. Variabel tingkat pendapatan (uji t) tidak dapat dipengaruhi oleh variabel pengalaman atau lama usaha (tidak signifikan secara statistik) sehingga tidak mendukung hipotesis. Hal ini dikarenakan masyarakat (pengusaha) dengan pengalaman atau lama usaha yang masih relatif sedikit (belum lama) namun dengan usaha yang memiliki omset bagus, mampu mencapai tingkat pendapatan yang cukup tinggi. Sedangkan masyarakat dengan pengalaman lama namun dengan omset yang kurang bagus cenderung hanya mencapai tingkat pendapatan yang lebih kecil. Jadi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pengalaman yang lama tidak selalu menjamin tingkat pendapatan yang tinggi.

6. Variabel tingkat pendapatan (uji t) dipengaruhi oleh variabel lama pendidikan yang signifikan secara statistik, sehingga dan mendukung hipotesis.
7. Variabel tingkat pendapatan (uji t) dipengaruhi oleh variabel kepemilikan usaha sampingan yang signifikan secara statistik, sehingga mendukung hipotesis.
8. Model terbebas dari uji diagnosis (uji asumsi klasik) yaitu heteroskedastisitas, autokorelasi dan multikolinearitas.
9. Dalam perkembangannya, BUKP cenderung mengalami situasi yang naik turun apabila dilihat dari jumlah nasabahnya, jumlah kredit yang disalurkan dan rata-rata kredit per nasabah. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari situasi maupun kondisi masyarakatnya.
10. Dengan kredit dari BUKP maka kebutuhan modal usaha bagi masyarakat belum sepenuhnya dapat terpenuhi, sehingga sebagian masyarakat / nasabahnya masih ada yang mencari alternatif sumber pinjaman ditempat lainnya. Fungsi kredit BUKP baru mampu membantu mencukupi sebagian modal usaha nasabah agar usaha nasabah tersebut bisa bertahan namun untuk memperluas atau mengembangkan usaha, kredit BUKP belum bisa mencukupi mengingat sumber modal BUKP juga terbatas.

5.2. Saran

1. Untuk lebih meningkatkan pendapatan atau tingkat kesejahteraan, maka sebaiknya seorang pengusaha ataupun pedagang harus memiliki cukup modal dalam menjalankan usahanya, ataupun kalau modal tersebut belum ada ataupun belum mencukupi, maka bisa diatasi dengan kredit.
2. Keterampilan dalam menjalankan usaha juga sangat penting demi mencapai tingkat pendapatan yang lebih baik, sehingga masyarakat atau seorang pengusaha sudah seharusnya terus meningkatkan keterampilannya. Oleh karena itu pendidikan (Iptek) merupakan faktor yang sangat penting untuk terus diperhatikan, terlebih untuk generasi selanjutnya.
3. Sebaiknya seorang pengusaha bisa dan perlu melakukan usaha lebih dari satu jenis usaha, karena dengan memiliki usaha sampingan maka peluang memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi akan lebih mudah tercapai dari pada hanya memiliki satu usaha pokok saja.
4. BUKP sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang keberadaannya telah dekat dengan masyarakat pedesaan sebaiknya terus melakukan pendekatan dengan masyarakat disekitarnya demi perkembangannya di masa-masa mendatang dan diharapkan mampu memperkecil ruang gerak rentenir ataupun pengijon dan sejenisnya yang selalu memanfaatkan ketidakberdayaan masyarakat kecil.

5. Sebagai lembaga pemberi kredit bagi masyarakat kecil sebaiknya BUKP dapat lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat agar kebutuhan modal usaha masyarakat dapat terpenuhi oleh BUKP sehingga masyarakat tidak perlu lagi mencari alternatif pinjaman di tempat lain.